

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya. Hampir seluruh daerah di Indonesia menyimpan kekayaan alam yang apabila dikelola dengan baik tentunya akan mensejahterakan rakyatnya. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, termasuk Indonesia. Pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tertulis bahwa "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>1</sup> Hal ini berarti memiliki pekerjaan yang layak dan hidup bebas dari kemiskinan merupakan hak asasi setiap warga Negara dan merupakan tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu.

Istilah kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan dalam berbagai keadaan hidup. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dihadapi hampir semua generasi di dunia, baik pada Negara berkembang maupun pada Negara maju. Masalahnya sama yaitu kemiskinan, namun dimensinya berbeda. Masalah kemiskinan di Negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen dalam masyarakat mereka tapi bagi Negara berkembang seperti Indonesia persoalannya menjadi kompleks

---

<sup>1</sup>Anonim, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Gradien Mediatama, 2011), p.37

karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk.<sup>2</sup>

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.<sup>3</sup> Besarnya ukuran standar minimum tersebut relatif menurut pendekatan mana yang digunakan. Sementara itu, UNDP dalam laporannya pada *Human Development Report* tahun 1997, memperkenalkan suatu indikator kemiskinan yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan antara lain: (1) kehidupan; (2) pendidikan dasar; (3) ketetapan ekonomi.

Pada tahun 2000 beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia menandatangani Deklarasi Milenium yang menunjukkan komitmen bangsa-bangsa tersebut untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*) dimana salah satu pointnya adalah pengentasan kemiskinan dengan indikator keberhasilannya adalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas rakyat.<sup>4</sup> Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah kemiskinan untuk diatasi sehingga taraf kehidupan rakyat menjadi lebih berkualitas.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan

---

<sup>2</sup>Maimun Sholeh, "Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategi Penanggulangannya", Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, p.1

<sup>3</sup>Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Ketiga*. (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2003), p. 35

<sup>4</sup>Ari Widiastuti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Jawa Tengah*, Skripsi Universitas Diponegoro, 2010, p.17

jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi hanya dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak- dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti kekurangan makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan-kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman

pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri.

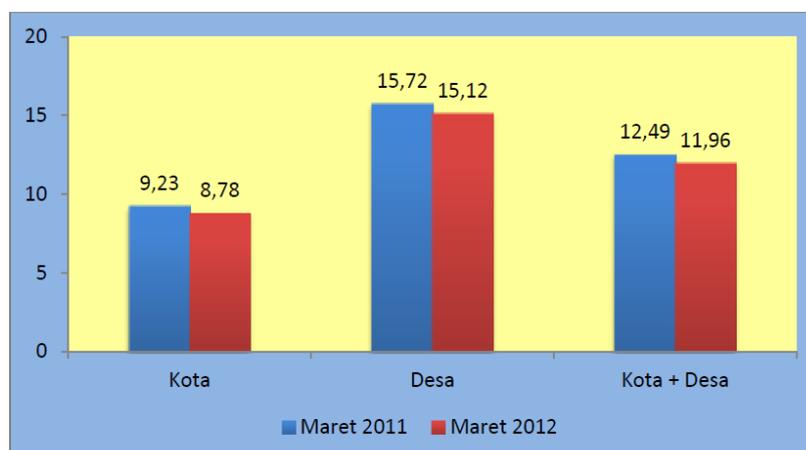
**Table I.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Perkotaan di Indonesia Tahun 2011**

No.	Pulau	Jumlah Penduduk Miskin
1.	Sumatra	2 135 770
2.	Jawa	7 518 720
3.	Bali dan Nusa Tenggara	658 130
4.	Kalimantan	265 440
5.	Sulawesi	354 980
6.	Maluku dan Papua	113 740
<b>7.</b>	<b>Indonesia</b>	<b>11 046 750</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah, 2011*

Data statistic menunjukkan bahwa dari total penduduk miskin di wilayah perkotaan Indonesia, pulau jawa memiliki kontribusi lebih besar atau sekitar 68 persen dibandingkan dengan pulau lainnya. Pulau jawa memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 7.518.720 jiwa, dan pulau Maluku dan Papua terdapat diurutan terakhir dengan jumlah penduduk miskinnya sebesar 113.740 jiwa.

**Gambar I.1**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih banyak dibanding penurunan penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode Maret 2011– Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 399,5 ribu orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode Maret 2011–Maret 2012 sedikit mengalami perubahan. Pada bulan Maret 2011, 63,20 persen penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2012 persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan mencapai 63,45 persen.

Penyebab kemiskinan antara lain pendidikan yang rendah, rendahnya mutu kesehatan, kepemilikan alat produktif yang terbatas, rendahnya penguasaan teknologi. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu daerah. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih

terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan.

Pembangunan ekonomi yang semenjak masa sentralistik terpusat di Pulau Jawa tidak melupakan Jawa Barat dari masalah kemiskinan. Menurut Siregar dan Wahyuniarti, jumlah penduduk miskin di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.<sup>5</sup> Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2010 mencapai rata-rata 56,65 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa 2006-2010**

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2006	407,1	5.712,5	7.100,6	648,7	7.678,1	904,3
2007	405,7	5.457,9	6.557,2	633,5	7.155,3	886,2
2008	379,6	5.249,5	6.189,6	616,3	6.651,3	816,7
2009	323,2	4.852,5	5.655,4	585,8	6.022,6	788,0
2010	312,1	4.716,9	5.218,7	577,3	5.529,3	758,2

<sup>5</sup>Harminto Siregar dan Dwi Wahyuniarti. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. 2008. (<http://deptan.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2012, pukul 19.25)

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Secara umum jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai 2010. Penduduk miskin terbanyak berada di provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 6.607,3 ribu jiwa, sedangkan Jawa Barat menduduki posisi terbanyak ketiga dengan rata-rata 5.197,8 ribu jiwa. Sementara yang terendah yaitu di provinsi DKI Jakarta sebesar 366 ribu jiwa.

Jawa Barat merupakan provinsi besar di Pulau Jawa bukan saja luas wilayahnya, tapi juga jumlah penduduknya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 43.053.732 jiwa menempati urutan pertama dibandingkan provinsi di pulau lainnya. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 sebesar 35.732.473 jiwa maka telah terjadi kelahiran sebesar 7.330.259 selama kurun waktu 10 tahun di Jawa Barat. Berarti ada lebih kurang 7 jutaan bayi lahir hidup setiap tahunnya. Tingkat kelahiran di Jawa Barat ternyata masih cukup tinggi.<sup>6</sup> Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangannya menunjukkan Jawa Barat merupakan Provinsi Bagian barat laut. Jawa Barat berbatasan langsung dengan daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ibu Kota Negara Indonesia. Pada tahun 2000 Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 tahun 2003, pemerintah mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat yaitu Suku Betawi yang berbahasa melayu dialek betawi, Suku

---

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, *Menuju Era Baru Kependudukan Jawa Barat: Analisis Profil Keendudukan Propinsi Jawa Barat*, BPS Jawa Barat 2010, p.14

Sunda yang berbahasa Sunda dan Suku Cirebon yang berbahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya).

Menjelang tahun 2013 pembangunan di Jawa Barat memasuki tahap rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah tahun 2008-2013. Pembangunan ini menuntut perhatian lebih. Tak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis berdekatan dengan ibukota Negara, mendorong Jawa Barat berperan aktif sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat saat ini antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Kemiskinan di Jawa Barat berada di posisi lima terbesar di Indonesia, Jawa Barat berada di posisi terbesar kedua, yakni dengan rata-rata 6607,3 ribu jiwa yang tiap tahunnya mengalami penurunan walaupun tidak begitu drastis.

**Table I.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Barat**  
**Tahun 2006-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>% Penduduk Miskin</b>
2006	5.712.500	14,49
2007	5.457.900	13,55
2008	5.249.500	12,74
2009	4.852.500	11,58
2010	4.716.900	10,93

*Sumber : BPS-RI tahun 2011*

Melihat data kemiskinan di atas, jelas bahwa sejak dilakukannya sensus penduduk miskin sampai sekarang ini sebenarnya besar kecil jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinanyang ditetapkan oleh pemerintah.

Jawa Barat dalah daerah yang tidak bisa dikatakan kecil. Tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Barat membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur antara lain (1) pendapatan per kapita (pdrb); (2) tingkat pengangguran; (3) tingkat pendidikan, (4) pendapatan asli daerah; (5) tingkat produksi (6) kesempatan pekerjaan.

Salah satu faktor yang sangat penting yaitu Pendapatan Perkapita. Pendapatan perkapita merupakan salah satu tolak ukur dalam meningkatnya atau menurunnya kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat

untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin rendah kemiskinan seseorang. PDRB Per Kapita Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang dilihat dari harga konstan, pada tahun 2009 pdrb Jawa Barat berada di angka 291 juta, di tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup drastis sekitar 321 juta. Hal ini menjelaskan bahwa pdrb Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Barat melansir kontribusi terbesar yang menyokong pertumbuhan ekonomi Jabar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restaurant dengan nilai mencapai 1,09%. Disusul sektor industry pengolahan sebesar 0,81% dan sektor bangunan sebesar 0,26%. Sememntara sisanya dari sektor telekomunikasi dan pengangkutan 0,20%, jasa 0,09%, serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,04%.<sup>7</sup> Laju PDRB kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dapat dilihat pad tabel di bawah ini:

**Tabel I.4**  
**Perkembangan Laju PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Tahun 2006 – 2010**

TAHUN	LAJU PDRB (%)
2006	6.30
2007	5.72
2008	5.93
2009	5.06
2010	5.83

*Sumber: BPS Jawa Barat*

<sup>7</sup><http://kabare-ekonomi-jabar-pdrb-jabar-tumbuh-6.html> (diakses tanggal 12 Agustus 2012)

Berdasarkan data di atas, PDRB Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 5,72 %, sedangkan tahun sebelumnya sebesar 6,30 %. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan semua komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, serta ekspor maupun impor.<sup>8</sup>

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi suatu negara apakah perekonomiannya berkembang atau lambat bahkan mengalami penurunan. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Pengangguran yang semakin besar akan menjadi beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud.

---

<sup>8</sup>Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat No.10/05/32/Th. IX, 15 Mei 2007, p. 6

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu daerah, ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf (amh). Berikut adalah data angka melek huruf (amh) di Jawa Barat.

**Table I.5**  
**Angka Melek Huruf (AMH) Jawa Barat Tahun 2008-2010**

AMH	Tahun		
	2008	2009	2010
15+	95,53	95,85	96,18
15-24	99,89	99,9	99,9
15-44	99,24	99,46	99,58
45+	88,01	88,78	88,46

*Sumber data: Susesna 2008-2010*

Produksi merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Melalui proses produksi bisa dihasilkan berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh manusia. Tingkat produksi juga dijadikan sebagai patokan penilaian atas tingkat kesejahteraan suatu daerah. Jadi tidak heran bila setiap daerah berlomba - lomba meningkatkan hasil produksi secara global untuk meningkatkan pendapatan perkapitanya yang berakibat akan berkurangnya kemiskinan di daerah tersebut.

Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu dapat juga disebut sebagai kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan

terjadinya lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari kerja. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.<sup>9</sup> Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Dari bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 2 itu jelas bahwa pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat karena hal ini berhubungan dengan usaha masyarakat untuk mendapat penghasilan, sehingga tiap warga yang mempunyai penghasilan akan terhindar dari kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kemiskinan di Jawa Barat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Rendahnya pendapatan per kapita.
2. Tingkat pengangguran yang masih tinggi.

---

<sup>9</sup>Tulus T.H. Tambunan. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) p. 115

3. Pendidikan yang belum merata.
4. Rendahnya pendapatan asli daerah.
5. Rendahnya tingkat produksi.
6. Kesempatan kerja yang tidak merata.

### **C. Pembatasan masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah kemiskinan di Jawa Barat memiliki penyebab yang luas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada “Pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan”.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh pendapatan per kapita terhadap kemiskinan di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan perkapita terhadap kemiskinan di Jawa Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah mutlak :

1. Mengetahui besarnya pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.
2. Mengetahui besarnya pengaruh antara pendapatan perkapita terhadap kemiskinan di Jawa Barat.
3. Mengetahui besarnya pengaruh antara tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, dan kemiskinan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrument evaluasi tentang tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita dalam kaitannya dengan kemiskinan.